

93% Unique

Total 16576 chars, 2063 words, 93 unique sentence(s).

Custom Writing Services - Paper writing service you can trust. Your assignment is our priority! Papers ready in 3 hours!
Proficient writing: top academic writers at your service 24/7! Receive a premium level paper!

STORE YOUR DOCUMENTS IN THE CLOUD - 1GB of private storage for free on our new file hosting!

Results	Query	Domains (original links)
Unique	Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro Email : junadisulis06@gmail.com Abstract Law No	-
Unique	The purpose of this study was to find out the Implementation of Law No	-
Unique	24 of 2011 concerning the Health Social Security Organizing Agency (BPJS) in Bojonegoro Regency	-
Unique	Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No	-
Unique	Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan daftar peserta BPJS	-
Unique	METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	-
Unique	Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro	-
Unique	Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display and conclusion drawing/verifying"	-
Unique	HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Undang-Undang No	-
44 results	1 April 2019 16 dan fungsinya dengan baik	safenifeni.com infobenua.id engelsport.blogspot.com charliedbeauty.blogspot.com charliedbeauty.blogspot.com beringinnews.com randysatria20.blogspot.com estudong.com bundamei.blogspot.com thabaart.blogspot.com
Unique	Tugas yang dilaksanakan BPJS merupakan bentuk implementasi Undang-Undang No	-

Unique	peserta menganggap mendapatkan banyak kemudahan serta mendapatkan banyak informasi dibandingkan mendaftar secara online	-
Unique	Pemungutan menggunakan PPOB (Payment Point Online Banking) dirasakan peserta lebih cepat, efektif dan mudah	-
Unique	Peserta BPJS memberikan nomor pelanggan kepada kasier selanjutnya kasier memberitahukan informasi tunggakan	-
Unique	Pemungutan menggunakan PPOB memudahkan masyarakat dalam membayar iuran BPJS setiap bulannya	-
Unique	Peserta tidak perlu datang jauh-jauh dari rumah menuju kantor BPJS untuk membayar iuran	-
Unique	Masyarakat menganggap biaya admin Rp	-
Unique	Penggunaan jalur PPOB menurut responden juga lebih memudahkan dikarenakan dapat dilakukan kapan saja	-
1 results	Adapun untuk yang tidak tergolong PBI maka pembayaran iurannya dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku	id.scribd.com
Unique	Dalam Undang-Undang yang berlaku dijelaskan bahwa pemerintah harus membayar iuran untuk peserta BPI sebesar 23.000/bulan	-
Unique	Setelah itu, mereka baru mendapatkan Kartu Indonesia Sehat yang merupakan kartu dari BPJS	-
Unique	Data tersebut nantinya digunakan sebagai acuan penerima bantuan iuran (PBI)	-
Unique	Hal tersebut sesuai dengan cuplikan wawancara kepada Kepala Cabang BPJS Kabupaten Bojonegoro	-
Unique	Informasi mempunyai dua bentuk yakni bagaimanamelaksanakan suatu kebijakan dan data-data ketaatan personil terhadap peraturan pemerintah	-
Unique	GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol	-
Unique	Banyak peserta BPJS mendapatkan informasi terkait BPJS melalui informasi tidak langsung	-
Unique	Informasi tidak langsung dilaksanakan dalam satu tahun mencapai 60 kali kegiatan	-
Unique	BPJS melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta	-
Unique	Pelaksanaan penerima bantuan iuran dari Pemerintah sudah dilaksanakan BPJS Cabang Bojonegoro	-
Unique	Jumlah Penerima Bantuan iuran pemerintah pada tahun 2017 mencapai 597.356 peserta	-
Unique	Dalam Undang-Undang yang berlaku dijelaskan bahwa pemerintah harus membayar iuran untuk peserta PBI sebesar 23.000/bulan	-
Unique	Sedangkan pada pengelola data peserta paling banyak mengelola tentang perubahan identitas yaitu sebanyak 7.712 jiwa	-
Unique	Kegiatan meliputi penyebaran brosur, pemasangan banner maupun informasi melalui media online	-

Unique	DAFTAR PUSTAKA Abdul Solihin Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke	-
Unique	14 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI	-
Unique	24 of 2011 concerning Social Security is a form of social protection to guarantee	-
Unique	The research approach used is a qualitative approach, this study uses a non probability	-
Unique	collection of participant data using the collective path and the most information is done directly,	-
Unique	ada pada setiap Negara, meskipun zaman telah memasuki era globalisasi namun tidak dapat dipungkiri masalah	-
Unique	masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab untuk mengatur terpenuhinya hak hidup sehat	-
Unique	atas yang mempunyai wewenang menetapkan pilihan atas alternatif pelayanan kesehatan Masalah kesehatan senantiasa berubah dari	-
Unique	Tinggi dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku dan pelayanan	-
Unique	Derajat kesehatan yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan	-
2 results	Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut	docshare.tips scribd.com
3 results	di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara 15 Indonesia paling singkat	es.scribd.com scribd.com scribd.com
Unique	seluruh penduduk di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat	-
Unique	40 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi	-
9,120 results	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk	makalah79.blogspot.com tiararti.blogspot.com kuliahnyaata.blogspot.com dudung1010.blogspot.com filehukum-id.blogspot.com bpjsketenagakerjaan.go.id ayushintiaa.blogspot.com contohmakalahdocx.blogspot.com hukumonline.com e-journal.jurwidyakop3.com
Unique	Jaminan Sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar	-
Unique	Berdasarkan observasi awal oleh peneliti di BPJS Kantor Cabang Bojonegoro terhadap narasumber yang terdiri	-
Unique	sesuai dengan ketentuan program serta pemberian informasi terkait BPJS kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro	-

Unique	dan mengelola data peserta program jaminan sosial, 5) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial	-
Unique	Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer	-
Unique	Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi,	-
Unique	Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif Model miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa	-
Unique	diperoleh data bahwa, BPJS cabang Bojonegoro sudah melaksanakan tugas GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik	-
Unique	Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta Dalam penerimaan pendaftaran peserta BPJS di Kabupaten dilakukan dengan	-
Unique	Pendaftaran cara manual ini dilakukan dengan cara peserta daftar langsung Ke Kantor BPJS Kabupaten	-
Unique	oleh peserta dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS pada waktu terdapat event kegiatan yang dilaksanakan	-
Unique	Event kegiatan tersebut yaitu Event Kegiatan Pameran Expo maupun Car free day yang biasanya	-
Unique	Banyaknya peserta yang mendaftarkan melalui offline (manual) dibandingkan menggunakan online dikarenakan pendaftaran melalui offline	-
Unique	Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja Pemungutan iuran dari peserta dan	-
Unique	Penggunaan jalur online yang dimaksud adalah pembayaran menggunakan channel- channel perbankan atau PPOB (Payment Point	-
Unique	Pembayaran PPOB (Payment Point Online Banking) dapat dilakukan di tempat-tempat pembayaran yang sudah ditunjuk	-
Unique	2000,- tidak sebanding dengan ketika mereka datang langsung di Kantor BPJS Kabupaten Bojonegoro, harus	-
Unique	Responden menuturkan bahwa pembayaran iuran biasanya dilakukan sekaligus melakukan belanja di pusat perbelanjaan seperti	-
Unique	iurannya ditanggung oleh pemerintah, ini berarti ada anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk menanggung biaya kesehatan	-
Unique	Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah sejatinya memberikan bantuan untuk rakyat yang ekonomi	-
Unique	24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bojonegoro 17 masyarakat	-
Unique	Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat yang kurang mampu senang dengan adanya Bantuan Iuran Kesehatan	-

Unique	Peserta mengatakan sebelum mendapatkan bantuan iuran BPJS, mereka di data tersebut oleh Dinas Sosial selanjutnya	-
Unique	Mengumpulkan dan Mengelola Data Peserta Program Jaminan Sosial Dalam menyelenggarakan suatu tugas yang seharusnya	-
Unique	Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis selama melakukan penelitian, pelaksana kebijakan Program BPJS Cabang Bojonegoro	-
Unique	Mulai dari prosedur pendaftaran peserta, pelayanan perubahan data peserta, pembayaran iuran, dan prosedur pelayanan klaim	-
Unique	BPJS Cabang Bojonegoro juga melakukan tugasnya dalam mengumpulkan dan mengelola data peserta sesuai dengan	-
Unique	Dengan adanya segmen kategori peserta memudahkan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas yang	-
Unique	Jalur kolektif tersebut paling banyak didapatkan dari data Dinas Sosial bagi penerima bantuan Iuran	-
Unique	Dinas Sosial melakukan pendataan kepada masyarakat ekonomi rendah, masyarakat fakir miskin, selanjutnya data tersebut dilakukan	-
Unique	Perubahan identitas merupakan perubahan yang paling banyak dilakukan karena rata-rata pendaftaran peserta menggunakan jalur	-
Unique	peserta, karena peserta kurang memahami prosedur pengisian formulir tersebut sehingga data yang terdaftar masih banyak	-
Unique	Berbeda dengan peserta yang daftar secara perorangan yaitu datang langsung di Kantor BPJS Cabang	-
Unique	Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat Informasi merupakan sumber	-
Unique	Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan bahwa pelaksana kebijakan sudah dibekali dengan suatu	-
Unique	Buku tersebut antara lain PERMENKES Nomor 28 Tahun 2014, PERGUBSU Nomor 35 Tahun 2014,	-
Unique	1 April 2019 18 Dengan adanya pedoman-pedoman pelaksanaan implementasi BPJS tersebut, maka dapat disimpulkan	-
Unique	24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Cabang Bojonegoro sudah dilaksanakan	-
Unique	Informasi tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para informan dan pengamatan yang secara	-
Unique	Kegiatan pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara penyebaran program BPJS melalui Brosur,	-

Unique	Pendaftaran Peserta BPJS lebih banyak dilakukan melalui jalur Offline (manual) yaitu mendaftar langsung di	-
Unique	Pemungutan dan pengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja BPJS Cabang Bojonegoro lebih banyak	-
Unique	Karena menurut peserta BPJS membayar menggunakan jasa PPOB (Payment Point Online Banking) dirasa lebih	-
Unique	Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro dapat dilakukan paling banyak menggunakan jalur	-
Unique	Jalur kolektif tersebut paling banyak didapatkan dari data Dinas Sosial bagi penerima bantuan iuran	-
Unique	Pelaksanaan pemberian informasi lebih banyak dilakukan secara tidak langsung yaitu dalam satu tahun dilakukan	-
Unique	Cet ke 6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit	-
Unique	Offset, Bandung, 2007 Nursalam, Metodologi penelitian: pendekatan praktis (edisi 3), Salemba Medika, Jakarta, 2013	-
Unique	24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bojonegoro 19 Syaokani,	-
Unique	Nursalam, Metodologi penelitian: pendekatan praktis (edisi 3), Salemba Medika, Jakarta, 2013 Peraturan : Peraturan Menteri	-
421 results	Tahun 2004 undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta,	eprints.umk.ac.id facebook.com researchgate.net ar.scribd.com wisatanewongwonosobo.blogspot.com academia.edu etd.repository.ugm.ac.id eprints.unm.ac.id id.scribd.com scholar.unand.ac.id

Top plagiarizing domains: **scribd.com** (3 matches); **id.scribd.com** (2 matches); **charliedbeauty.blogspot.com** (2 matches); **eprints.umk.ac.id** (1 matches); **facebook.com** (1 matches); **hukumonline.com** (1 matches); **ayushintiaa.blogspot.com** (1 matches); **contohmakalahdocx.blogspot.com** (1 matches); **e-journal.jurwidyakop3.com** (1 matches); **researchgate.net** (1 matches); **eprints.unm.ac.id** (1 matches); **scholar.unand.ac.id** (1 matches); **etd.repository.ugm.ac.id** (1 matches); **academia.edu** (1 matches); **ar.scribd.com** (1 matches); **wisatanewongwonosobo.blogspot.com** (1 matches); **bpjsketenagakerjaan.go.id** (1 matches); **kuliahnyata.blogspot.com** (1 matches); **estudong.com** (1 matches); **bundamei.blogspot.com** (1 matches); **randysatria20.blogspot.com** (1 matches); **beringinnews.com** (1 matches); **infobenua.id** (1 matches); **engelsport.blogspot.com** (1 matches); **thabaart.blogspot.com** (1 matches); **docshare.tips** (1 matches); **safenifeni.com** (1 matches); **dudung1010.blogspot.com** (1 matches); **tiararti.blogspot.com** (1 matches); **makalah79.blogspot.com** (1 matches); **es.scribd.com** (1 matches); **filehukum-id.blogspot.com** (1 matches);

14 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KABUPATEN BOJONEGORO Junadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro Email : junadisulis06@gmail.com Abstract Law No. 24 of 2011 concerning Social Security is a form of social protection to guarantee that all people can fulfill the basic needs of a decent life. The purpose of this study was to find out the Implementation of Law No. 24 of 2011 concerning the Health Social Security Organizing Agency (BPJS) in Bojonegoro Regency. The research approach used is a qualitative approach, this study uses a non probability sampling technique with purposive sampling technique, data collection using observation, interviews, and literature studies. The results showed that most of the Bojonegoro Branch BPJS received registration through offline channels (dating directly to the office), the most collection using online channels (PPOB payments), the largest number of participants from the contribution recipients in the Social Data Office, the largest collection of participant data using the collective path and the most information is done directly, namely by distributing banners, brochures and information in online media. Keywords: Law Number 24 of 2011, BPJS PENDAHULUAN Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap Negara, meskipun zaman telah memasuki era globalisasi namun tidak dapat dipungkiri masalah kemiskinan selalu menjadi penghambat kemajuan tiap-tiap Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dinyatakan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab untuk mengantar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Kewenangan dalam pelayanan kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah, dan pada golongan sosial atas yang mempunyai wewenang menetapkan pilihan atas alternatif pelayanan kesehatan Masalah kesehatan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Tinggi dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan yang kesemuanya saling berkaitan. Derajat kesehatan yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), telah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu : BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang dimana BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja yang ada di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara 15 Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Negara Indonesia. Sedangkan BPJS Kesehatan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Negara Indonesia. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN) bahwa adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). Jaminan Sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan observasi awal oleh peneliti di BPJS Kantor Cabang Bojonegoro terhadap narasumber yang terdiri dari pihak BPJS dan peserta BPJS tentang pelaksanaan BPJS di Kabupaten Bojonegoro tergolong baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi peningkatan daftar peserta BPJS setiap tahun meningkat, pelayanan BPJS Cabang Bojonegoro sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Undang- Undang, pengelolaan dana iuran dikelola dengan baik, pengelolaan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program serta pemberian informasi terkait BPJS kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat terserap dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan daftar peserta BPJS. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, 2) memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, 3) menerima bantuan iuran dari Pemerintah, 4) mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, 5) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 100 informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif Model miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display and conclusion drawing/verifying”. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Cabang Bojonegoro dapat diperoleh data bahwa, BPJS cabang Bojonegoro sudah melaksanakan tugas GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1 April 2019 16 dan fungsinya dengan baik. Tugas yang dilaksanakan BPJS merupakan bentuk implementasi Undang-Undang No. 24 tahun 2011. 1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta Dalam penerimaan pendaftaran peserta BPJS di Kabupaten dilakukan dengan menggunakan cara offline (Manual). Pendaftaran cara manual ini dilakukan dengan cara peserta daftar langsung Ke Kantor BPJS Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad Bojonegoro. Selain dengan mendatangi Kantor BPJS Kabupaten Bojonegoro, pendaftaran peserta BPJS secara manual juga dilakukan oleh peserta dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS pada waktu terdapat event kegiatan yang dilaksanakan oleh BPJS. Event kegiatan tersebut yaitu Event Kegiatan Pameran Expo maupun Car free day yang biasanya dilaksanakan 1 minggu sekali. Banyaknya peserta yang mendaftarkan melalui offline (manual) dibandingkan menggunakan online dikarenakan pendaftaran melalui offline (manual) jauh lebih mudah dirasakan oleh peserta. peserta menganggap mendapatkan banyak kemudahan serta mendapatkan banyak informasi dibandingkan mendaftar secara online. 2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja Pemungutan iuran dari peserta dan pemberi kerja BPJS lebih banyak menggunakan jalur online. Penggunaan jalur online yang dimaksud adalah pembayaran menggunakan channel- channel perbankan atau PPOB (Payment Point Online Banking). Pemungutan menggunakan PPOB (Payment Point Online Banking) dirasakan peserta lebih cepat, efektif dan mudah. Pembayaran PPOB (Payment Point Online Banking) dapat dilakukan di tempat-tempat pembayaran yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Peserta BPJS memberikan nomor panggilan kepada kasier selanjutnya kasier memberitahukan informasi tunggakan. Pemungutan menggunakan PPOB memudahkan masyarakat dalam membayar iuran BPJS setiap bulannya. Peserta tidak perlu datang jauh-jauh dari rumah menuju kantor BPJS untuk membayar iuran. Masyarakat menganggap biaya admin Rp. 2000,- tidak sebanding dengan ketika mereka datang langsung di Kantor BPJS Kabupaten Bojonegoro, harus mengeluarkan biaya transportasi serta biaya lainnya. Penggunaan jalur PPOB menurut responden juga lebih memudahkan dikarenakan dapat dilakukan kapan saja. Responden menuturkan bahwa pembayaran iuran biasanya dilakukan sekaligus melakukan belanja di pusat perbelanjaan seperti Indomaret dan Alfamart. 3. Menerima Bantuan iuran dari Pemerintah Peserta Penerima Bantuan iuran (PBI) merupakan peserta yang kewajiban iurannya ditanggung oleh pemerintah, ini berarti ada anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk menanggung biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Adapun untuk yang tidak tergolong PBI maka pembayaran iurannya dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang yang berlaku dijelaskan bahwa pemerintah harus membayar iuran untuk peserta BPI sebesar 23.000/bulan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah sejatinya memberikan bantuan untuk rakyat yang ekonomi rendah, berbagai upaya dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada Junadi, Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bojonegoro 17 masyarakat bawah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat yang kurang mampu senang dengan adanya Bantuan iuran Kesehatan dari pemerintah. Peserta mengatakan sebelum mendapatkan bantuan iuran BPJS, mereka di data tersebut oleh Dinas Sosial selanjutnya mereka di survey terkait dengan keadaan ekonomi sekeluarga. Setelah itu, mereka baru mendapatkan Kartu Indonesia Sehat yang merupakan kartu dari BPJS. 4. Mengumpulkan dan Mengelola Data Peserta Program Jaminan Sosial Dalam menyelenggarakan suatu tugas yang seharusnya memang segera dilakukan karena kebutuhan yang mendesak terutama menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis selama melakukan penelitian, pelaksana kebijakan Program BPJS Cabang Bojonegoro telah melaksanakan wewenangnya dengan baik. Mulai dari prosedur pendaftaran peserta, pelayanan perubahan data peserta, pembayaran iuran, dan prosedur pelayanan klaim diberikan pelayanan yang baik dengan memberikan informasi se jelas-jelasnya. BPJS Cabang Bojonegoro juga melakukan tugasnya dalam mengumpulkan dan mengelola data peserta sesuai dengan segmen kategori peserta. Dengan adanya segmen kategori peserta memudahkan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jalur kolektif tersebut paling banyak didapatkan dari data Dinas Sosial bagi penerima bantuan iuran (PBI). Dinas Sosial melakukan pendataan kepada masyarakat ekonomi rendah, masyarakat fakir miskin, selanjutnya data tersebut dilakukan Verifikasi dan Validasi (verivali). Data tersebut nantinya digunakan sebagai acuan penerima bantuan iuran (PBI). Hal tersebut sesuai dengan cuplikan wawancara kepada Kepala Cabang BPJS Kabupaten Bojonegoro. Perubahan identitas merupakan perubahan yang paling banyak dilakukan karena rata-rata pendaftaran peserta menggunakan jalur kolektif. Pada jalur kolektif ini biasanya formulir yang diberikan kepada peserta diisi sesuai sepengetahuan diri peserta, karena peserta kurang memahami prosedur pengisian formulir tersebut sehingga data yang terdapat masih banyak terjadi kesalahan. Berbeda dengan peserta yang daftar secara perorangan yaitu datang langsung di Kantor BPJS Cabang Bojonegoro, peserta mendapatkan penjelasan lebih detail dari pegawai BPJS Cabang Bojonegoro. 5. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat Informasi merupakan sumber daya terpenting setelah staf atau SDM dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk yakni bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan data-data keadaan personil terhadap peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan bahwa pelaksana kebijakan sudah dibekali dengan suatu buku pedoman diantaranya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana program. Buku tersebut antara lain PERMENKES Nomor 28 Tahun 2014, PERGUBSU Nomor 35 Tahun 2014, Buku Pedoman tentang Sistem Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1 April 2019 18 Dengan adanya pedoman-pedoman pelaksanaan implementasi BPJS tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bojonegoro sudah dilaksanakan dengan baik. Informasi tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para informan dan pengamatan yang secara langsung penulis lakukan di BPJS Cabang Bojonegoro di Jalan Basuki Rahmat No. 65 A Bojonegoro. Banyak peserta BPJS mendapatkan informasi terkait BPJS melalui informasi tidak langsung. Informasi tidak langsung dilaksanakan dalam satu tahun mencapai 60 kali kegiatan. Kegiatan pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara penyebaran program BPJS melalui Brosur, Banner, Media internet yang sering dibaca oleh peserta. SIMPULAN 1. BPJS melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. Pendaftaran Peserta BPJS lebih banyak dilakukan melalui jalur Offline (manual) yaitu mendaftar langsung di Kantor BPJS. 2. Pemungutan dan pengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja BPJS Cabang Bojonegoro lebih banyak menggunakan jalur online atau dengan cara membayar melalui PPOB (Payment Point Online Banking). Karena menurut peserta BPJS membayar menggunakan jasa PPOB (Payment Point Online Banking) dirasa lebih mudah, efektif dan cepat. 3. Pelaksanaan penerima bantuan iuran dari Pemerintah sudah dilaksanakan BPJS Cabang Bojonegoro. Jumlah Penerima Bantuan iuran pemerintah pada tahun 2017 mencapai 597.356 peserta. Dalam Undang-Undang yang berlaku dijelaskan bahwa pemerintah harus membayar iuran untuk peserta PBI sebesar 23.000/bulan. 4. Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro dapat dilakukan paling banyak menggunakan jalur kolektif. Jalur kolektif tersebut paling banyak didapatkan dari data Dinas Sosial bagi penerima bantuan iuran (PBI). Sedangkan pada pengelola data peserta paling banyak mengelola perubahan identitas yaitu sebanyak 7.712 jiwa. 5. Pelaksanaan pemberian informasi lebih banyak dilakukan secara tidak langsung yaitu dalam satu tahun dilakukan penyebaran 60 x kegiatan. Kegiatan meliputi penyebaran brosur, pemasangan banner maupun informasi melalui media online. DAFTAR PUSTAKA Abdul Solihin Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 Alimul Hidayat, Aziz, Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data, Salemba Medika, Jakarta, 2009 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet ke 6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, 2007 Nursalam, Metodologi penelitian: pendekatan praktis (edisi 3), Salemba Medika, Jakarta, 2013 Usman Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Junadi, Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bojonegoro 19 Syauckani, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Suryamady, Nyoman. I, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabet, Bandung, 2005 Nursalam, Metodologi penelitian: pendekatan praktis (edisi 3), Salemba Medika, Jakarta, 2013 Peraturan : Peraturan Menteri Kesehatan, Undang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta, 2009 Peraturan Menteri Kesehatan, Undang- Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jakarta, 2011 Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 2004 GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1 April 2019